Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi
Kalimantan Barat

2022

LAPORAN KINERJA

INDEPENDENSI - INTEGRITAS - PROFESIONALISME

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah menyelesaikan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 (LAKIN). Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2022, dan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas sebagai satuan kerja BPK RI yang bertanggung jawab atas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, laporan ini juga dijadikan sebagai salah satu media penyampaian informasi kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat.

LAKIN BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 memuat di antaranya kemajuan atas 13 indikator kinerja utama (IKU) yang menjadi tolok ukur pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Dari 13 IKU tersebut, sembilan IKU dapat tercapai dengan baik bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 juga terus melakukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kinerja yang didukung dengan komitmen yang kuat dari seluruh unit kerja. Hal ini terwujud melalui pencapaian BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebagai satuan kerja dengan predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan peringkat terbaik III dalam kegiatan Pemutakhiran Data Mandiri (PDM). BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat juga melakukan pengembangan-pengembangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang menghasilkan enam inovasi dalam bidang pemeriksaan maupun kesekretariatan. Pencapaian-pencapaian tersebut merupakan komitmen BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang akan terus ditingkatkan pada tahun 2023 dalam menyongsong target akhir tahun 2024, yang tertuang dalam Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 2020 – 2024.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat sepenuhnya menggambarkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022, serta dapat dipahami dengan baik dan dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk mendorong peningkatan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun mendatang. Kami juga berharap laporan ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan oleh Pimpinan BPK.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR DIAGRAM vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 1
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 3
1. Sekretariat Perwakilan 4
2. Subauditorat Kalimantan Barat I 5
3. Subauditorat Kalimantan Barat II 6
D. SUMBER DAYA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 6
1. Sumber Daya Manusia 6
2. Anggaran 9
E. ISU STRATEGIS 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA 10
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 10
B. Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 11
1. Perjanjian Kerja 11
2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 13
A. Hasil Evaluasi AKIP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 13
B. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 13
1. Tingkat Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan 17
2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan 18
3. Tingkat Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 19
4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional 21
5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan 22

6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal 23
7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK 24
8. Hasil Evaluasi AKIP 25
9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi 26
10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan 27
11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi 29
12. Tingkat Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi 29
13. Tingkat Kinerja Anggaran 30
C. Analisis Efisiensi 31
D. Perubahan Budaya Kerja 32
E. Realisasi Anggaran 33
F. Inovasi 34
G. Penghargaan 37
BAB IV PENUTUP 38
LAMPIRAN 40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Kegiatan, Sasaran, Anggaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2022 12
Tabel 2. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 14
Tabel 3. Perbandingan Realisasi dalam Tiga Tahun Terakhir 15
Tabel 4. Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Lima Tahun 16
Tabel 5. Perkembangan Capaian IKU 1 Tahun 2020 – 2024 17
Tabel 6. Perkembangan Capaian IKU 2 Tahun 2020 – 2024 18
Tabel 7. Perkembangan Capaian IKU 3 Tahun 2020 – 2024 19
Tabel 8. Perkembangan Capaian IKU 4 Tahun 2020 – 2024 21
Tabel 9. Perkembangan Capaian IKU 5 Tahun 2020 – 2024 22
Tabel 10. Perkembangan Capaian IKU 6 Tahun 2020 – 2024 23
Tabel 11. Perkembangan Capaian IKU 7 Tahun 2020 – 2024 24
Tabel 12. Perkembangan Capaian IKU 8 Tahun 2020 – 2024 25
Tabel 13. Perkembangan Capaian IKU 9 Tahun 2020 – 2024 26
Tabel 14. Perkembangan Capaian IKU 10 Tahun 2020 – 2024 27
Tabel 15. Perkembangan Capaian IKU 11 Tahun 2020 – 2024 29
Tabel 16. Perkembangan Capaian IKU 12 Tahun 2020 – 2024 30
Tabel 17. Perkembangan Capaian IKU 12 Tahun 2020 – 2024 31
Tabel 18. Perbandingan Realisasi Anggaran, Rincian Output, dan Indikator Kinerja Tahun 2022 33
Tabel 19. Indikator Kinerja yang Mencapai dan Belum Mencapai Target 38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 3
Gambar 2. Target Sasaran Kegiatan Eselon II BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat11
Gambar 3. Penyerahan LHP LKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat TA 2021 18
Gambar 4. Penyerahan LHP Semester II Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 22
Gambar 5. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas 25
Gambar 7. Pengarahan Anggota I BPK RI 28
Gambar 6. Diklat Persiapan Pemeriksaan LKPD TA 2021 28
Gambar 8. Knowledge Transfer Forum dengan ANAO 28

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Komposisi SDM Menurut Jenis Jabatan 7
Diagram 2. Komposisi SDM Menurut Jenjang Pendidikan 7
Diagram 3. Komposisi SDM Menurut Golongan 7
Diagram 4. Komposisi SDM Menurut Status Kepegawaian 8
Diagram 5. Komposisi SDM Menurut Jenis Kelamin 8
Diagram 6. Komposisi SDM Menurut Masa Kerja di Perwakilan 8
Diagram 7. Tren Skor Kinerja Tahun 2022-2020 14
Diagram 8. Status Tindak Lanjut BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat s.d. Tahun 2022 20

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Guna mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbarui melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan unsur penyelenggara negara, tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan segala sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun laporan kinerja tidak hanya melekat kepada BPK sebagai suatu lembaga, tetapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa kementerian negara/lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan laporan kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana BPK, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebagai unit kerja pelaksana BPK wajib menyusun laporan kinerja yang merupakan dasar penyusunan Laporan Kinerja Pelaksana BPK. Laporan Kinerja (LAKIN) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja yang dikaitkan dengan anggaran dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BPK tahun 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.

B. TUGAS DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BPK merupakan suatu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam peraturan tersebut, BPK dibantu oleh pelaksana BPK yang salah satunya ialah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang berada di bawah Auditorat Keuangan Negara (AKN) VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI (Tortama KN VI).

Berdasarkan Pasal 606 Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi (AUI).

Pasal 607 Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 mengurai dua puluh fungsi yang diselenggarakan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut.

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
18. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
19. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat; dan
20. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

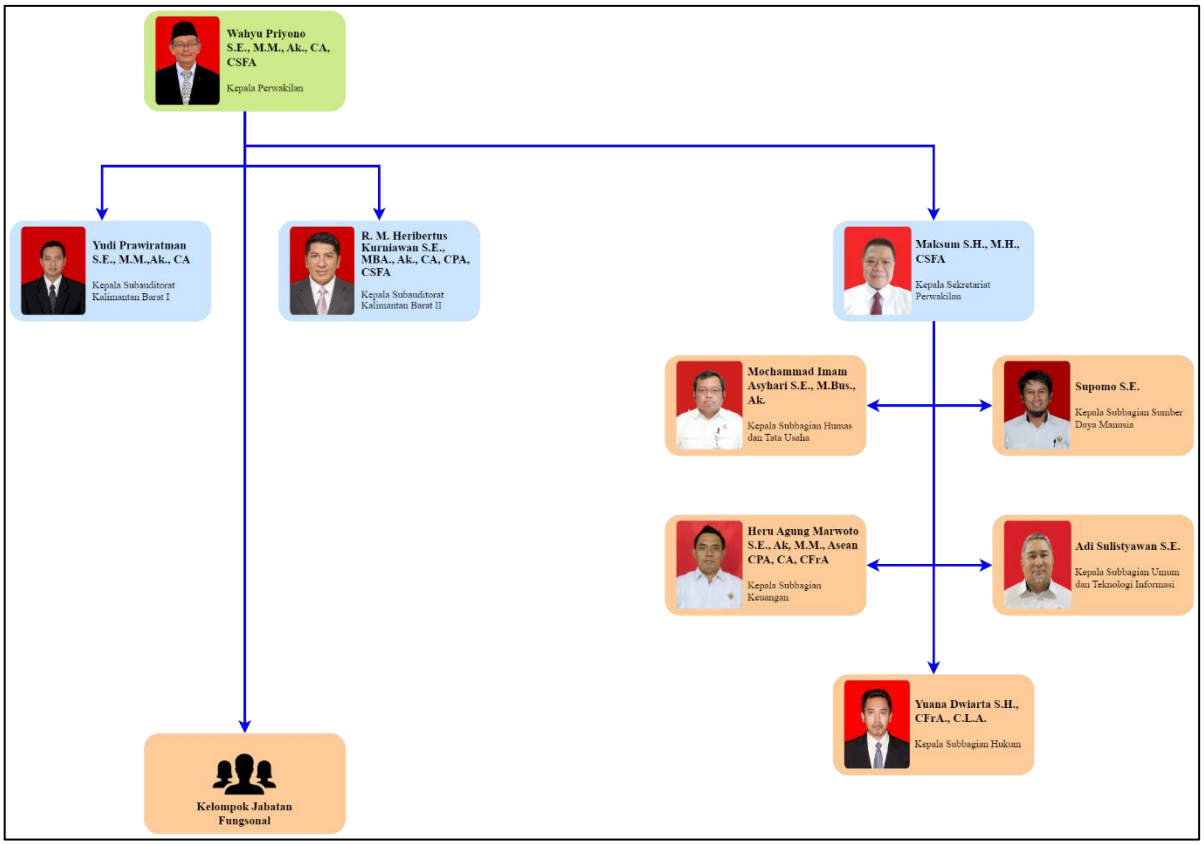

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan melalui Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPK RI nomor 1 Tahun 2019. Sesuai Pasal 605 peraturan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama KN VI. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang kepala dengan uraian tugas sebagai berikut.

1. **Sekretariat Perwakilan**

   Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Sekretariat Perwakilan dipimpin oleh seorang kepala sekretariat perwakilan yang membawahkan lima subbagian dengan uraian tugas sebagai berikut.

Sekretariat Perwakilan

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan (Humas dan TU Kalan)
- melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan;
- menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan;
- pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja; dan
- penyimpanan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Subbagian Sumber Daya Manusia (SDM)
- melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Subbagian Keuangan
- melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan; dan
- menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi (Umum dan TI)
- melaksanakan pemberian layanan administrasi umum;
- pengelolaan arsip dan teknologi informasi; dan
- melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Subbagian Hukum
- melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

2. Subauditorat Kalimantan Barat I

Subauditorat Kalimantan Barat I mempunyai tugas:

Subauditorat Kalimantan Barat I

pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas-entitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN untuk:

- merumuskan rencana kegiatan;
- mengusulkan tim pemeriksa;
- melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
- menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
- memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan.

menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

3. Subauditorat Kalimantan Barat II

Subauditorat Kalimantan Barat II mempunyai tugas:

Subauditorat Kalimantan Barat II

pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kayong Utara, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- merumuskan rencana kegiatan;
- mengusulkan tim pemeriksa;
- melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
- menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
- memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan.

menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

D. SUMBER DAYA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat per Desember 2022 berjumlah 133 orang dengan rincian sebagai berikut.

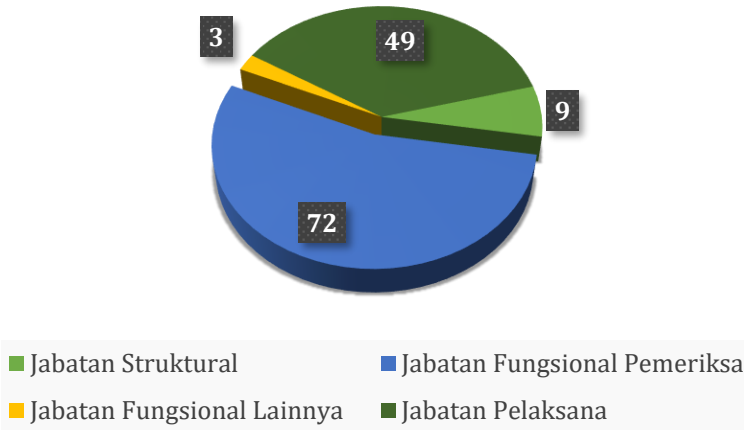

Diagram 1. Komposisi SDM Menurut Jenis Jabatan

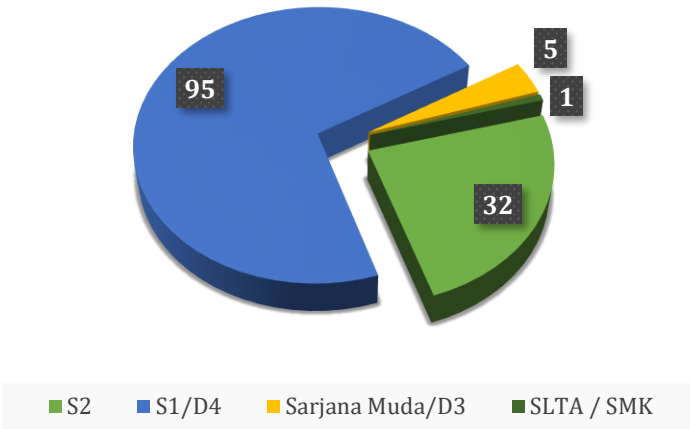

Diagram 2. Komposisi SDM Menurut Jenjang Pendidikan

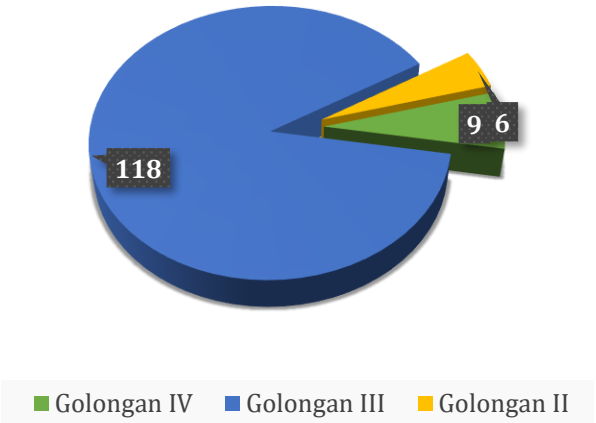

Diagram 3. Komposisi SDM Menurut Golongan

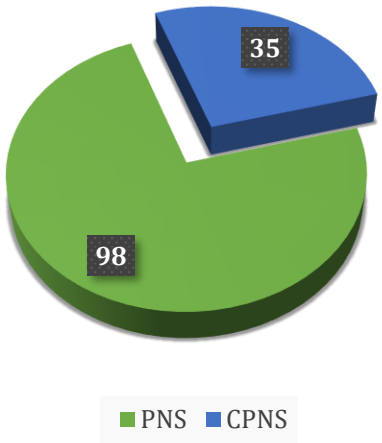

Diagram 4. Komposisi SDM Menurut Status Kepegawaian

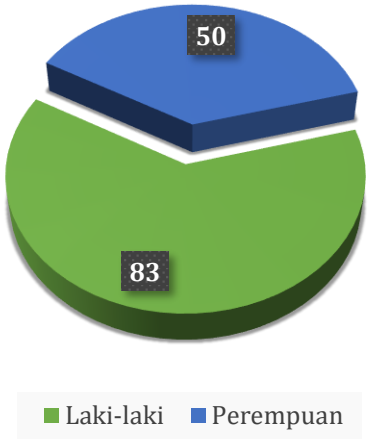

Diagram 5. Komposisi SDM Menurut Jenis Kelamin

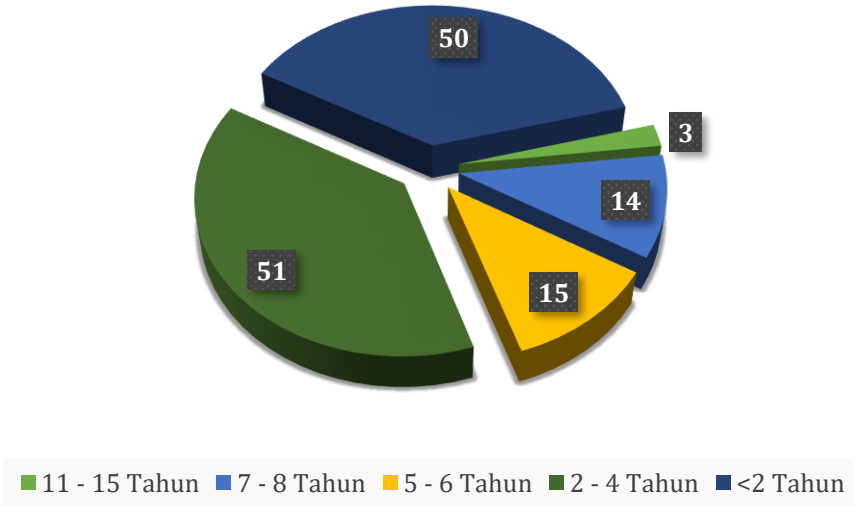

Diagram 6. Komposisi SDM Menurut Masa Kerja di Perwakilan

2. **Anggaran**

Pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp20.348.811.000,00. Sepanjang tahun 2022, terdapat penambahan anggaran pemeriksaan dan belanja pegawai terkait tunjangan fungsional sehingga anggaran menjadi Rp21.568.460.000,00, yang terdiri dari:

a. meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi Rp9.168.973.000,00
b. meningkatkan layanan pemeriksaan Rp12.399.487.000,00

E. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang dihadapi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2022 masih terkait dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum optimal. Diharapkan dengan menggunakan aplikasi SiPTL terdapat peningkatan prosentase penyelesaian yang lebih signifikan. Kemudian perlu dilakukan inovasi dan pengembangan terkait TI untuk mendorong efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi. Saat ini sedang dioptimalkan pemanfaatan portal BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebagai Database Entitas Pemeriksaan (DEP) dalam kegiatan layanan pemeriksaan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020 – 2024 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan strategi BPK. Selain itu, Renstra BPK 2020 – 2024 merupakan pedoman penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan kebijakan seluruh unit kerja di BPK. Visi, misi, nilai dasar, dan sasaran strategis dalam Renstra BPK 2020 – 2024 dijabarkan sebagai berikut.

VISI

"Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara"

Berdasarkan visi tersebut, BPK menyusun tiga misi, yaitu:

MISI

(1) memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
(2) mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
(3) melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menadi teladan bagi institusi lainnya.

Penyusunan visi dan misi berpijak pada nilai-nilai dasar yang harus dipegang teguh seluruh pegawai BPK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Nilai-nilai dasar tersebut terdiri dari:

NILAI DASAR

INDEPENDENSI, INTEGRITAS, PROFESIONALISME

Untuk mendukung tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menjabarkan rancangan aktivitas selama lima tahun dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 2020 – 2024 yang telah ditetapkan melalui peraturan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 8 September 2021.

Renstra tersebut merupakan landasan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 2020 – 2024, yaitu Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi. Hal ini sejalan dengan pengukuran kinerja melalui aplikasi Prisma setiap tahunnya sebagai bentuk monitoring pencapaian BPK

Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan kontribusi pencapaian kinerja terhadap unit kerja di atasnya, yaitu Auditorat Utama Keuangan Negara VI.

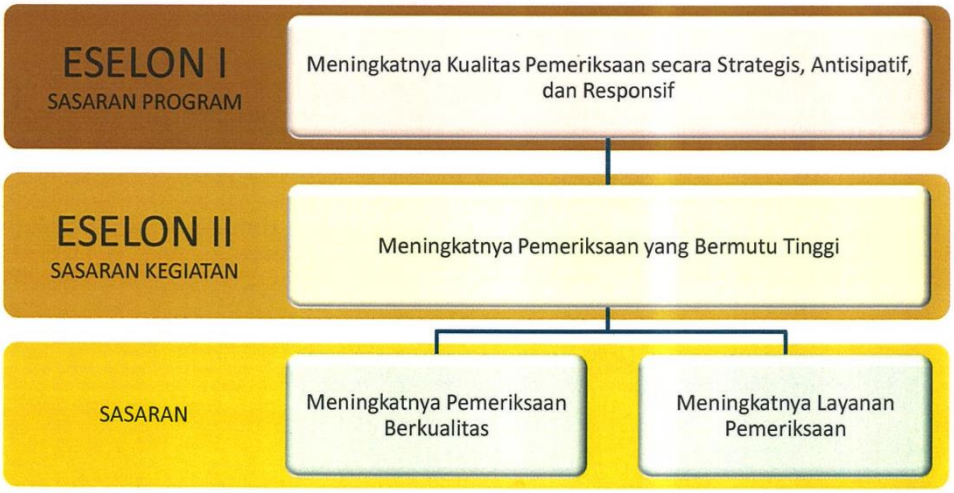

Gambar 2. Target Sasaran Kegiatan Eselon II BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Sasaran Kegiatan Eselon II, Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi, merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Perwujudannya akan tercermin dari hasil program teknis yang menjadi produk utama BPK, yakni hasil-hasil pemeriksaan yang mencakup rekomendasi, pendapat, pertimbangan, dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

Melalui sasaran kegiatan ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat ingin menjamin peningkatan mutu pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang sesuai dengan standar, yang diharapkan dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap akuntabilias kinerja BPK. Hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi dapat menjadi sumber informasi bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

B. TARGET KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Perjanjian Kerja

Sebagai bentuk upaya untuk mencapai target mewujudkan kinerja dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 – 2024, target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat selaku Eselon II dan Tortama KN VI selaku Eselon I dan atasan langsung Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, dokumen tersebut juga ditandatangani oleh Anggota VI BPK, Ketua BPK, dan Wakil Ketua BPK.

Sasaran kegiatan, anggaran, indikator kinerja dan target BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 2022 dijabarkan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Sasaran Kegiatan, Sasaran, Anggaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2022

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Rp20.348.811.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
• Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Rp8.628.102.000	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Rp11.720.709.000	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tngkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%

2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022

Seiring dengan penetapan Perjanjian Kinerja, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyusun rencana aksi pencapaian target-target kinerja tahunan untuk 13 indikator yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Rencana aksi tersebut memuat rincian kegiatan dan langkah-langkah kegiatan setiap triwulan, dan menggambarkan upaya-upaya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian target indikator kinerja. Rincian rencana aksi pencapaian target kinerja tahun 2022 ditampilkan dalam Lampiran 2.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. HASIL EVALUASI AKIP BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Utama, Implementasi SAKIP Tahun 2021 pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mendapat nilai sebesar 94,85 dengan predikat AA (Sangat memuaskan). Hasil evaluasi tersebut disampaikan melalui nota dinas Inspektur Utama Nomor 237ND/XI/7/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Sesuai kertas kerja evaluasi dalam nota dinas tersebut, komponen perencanaan kinerja dan evaluasi internal telah mencapai hasil 100%. Terkait komponen-komponen penilaian yang belum memberikan hasil maksimal, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan beberapa upaya, di antaranya mengadakan sosialisasi nilai-nilai dasar BPK dan budaya kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Subbagian SDM, selaku unit kerja pengampu IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi, telah menyampaikan laporan monitoring diklat melalui atasan langsung dan mengingatkan dan mengimbau para pegawai untuk memenuhi JP diklat minimum. Upaya-upaya tersebut berhasil meningkatkan realisasi capaian target kinerja untuk indikator kinerja indeks implementasi nilai dasar BPK dan indikator kinerja pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi.

B. CAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Selama tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

Pemeriksaan

1. Pelaksanaan pemeriksaan sesuai RKP dengan output 21 Laporan Hasil Pemeriksaan pada 15 entitas, yang meliputi:
   a. pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
   b. pemeriksaan tematik lokal, yakni pemeriksaan Kinerja Penanggulangan Kemiskinan (LFAR);
   c. pemeriksaan tematik nasional, yakni pemeriksaan Kinerja Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, pemeriksaan Kinerja Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak

dan Aman, dan pemeriksaan kepatuhan Pengelolaan Program Perlindungan Sosial BLT Desa; dan

d. pemeriksaan kepatuhan belanja daerah dan belanja infrastruktutur; dan

2. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut dan pemantauan kerugian daerah pada 15 entitas.

Layanan pemeriksaan

1. Diklat *off class* bekerjasama dengan Badiklat PKN;
2. Sosialisasi nilai-nilai dasar BPK;
3. Sosialisasi BIDICS SSA bekerjasama dengan Biro TI; dan
4. Mentoring dan pendampingan CASN.

Atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mendapat skor kinerja sebesar 99,64. Skor tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021, yaitu sebesar 100,25. Tren skor capaian kinerja disajikan dalam diagram berikut.

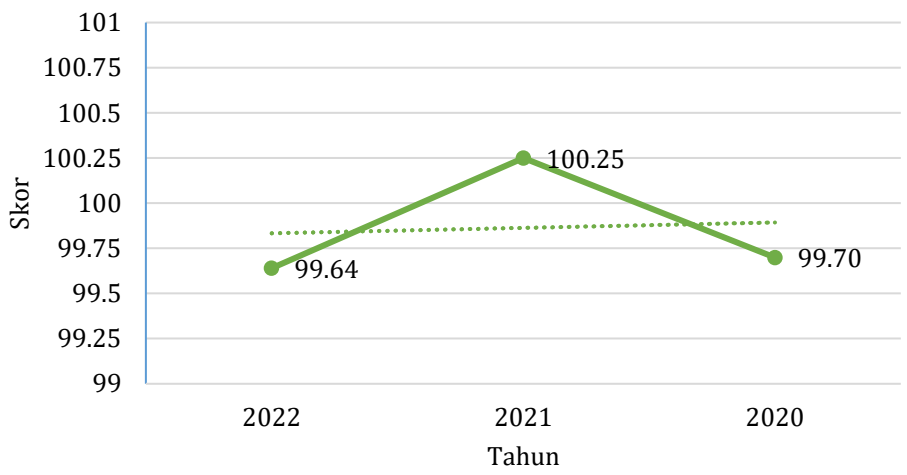

Diagram 7. Tren Skor Kinerja Tahun 2022-2020

Indikator kinerja tahun 2022 mengacu pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 2020 – 2024. Capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang diukur berdasarkan pencapaian atas 13 indikator kinerja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	83,75%	83,75
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100,00
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	79,38%	105,00

4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,91%	100,91
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100,05%	100,05
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,42%	100,42
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5 (Sangat Memuaskan)	4,69 (Sangat Memuaskan)	93,80
8	Hasil Evaluasi AKIP	88 (AA)	94,85 (AA)	105,00
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	94,44%	97,36
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	110,00%	105,00
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,8 (Memuaskan)	3,69 (Memuaskan)	97,11
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100,00
13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	88%	90,10%	102,39
Skor Kinerja Tahun 2022		**99,76**		

Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan realisasi dua tahun sebelumnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Perbandingan Realisasi dalam Tiga Tahun Terakhir

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020
Skor Kinerja			**99,76**	**100,25**	**99,70**
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	83,75%	88,67%	81,67%
	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100,00%	100,00%
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	79,38%	80,77%	80,51%
	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,91%	100,41%	101,10%
	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100%	100,05%	100,43%	100,00%
	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,42%	100,28%	100,00%
	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5 (Sangat Memuaskan)	4,69 (Sangat Memuaskan)	4,59 (Sangat Memuaskan)	4,58 (Sangat Memuaskan)
	Hasil Evaluasi AKIP	88 (AA)	94,85 (AA)	95,87%	92,75%
	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	94,44%	99,19%	99,19%

	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	110,00%	100,00%	100,00%
	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,8 (Memuaskan)	3,69 (Memuaskan)	3,91 (Memuaskan)	3,81 (Memuaskan)
	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	98,02%	97,17%
	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	90,10%	91,20%	91,86%

Capaian indikator kinerja tahun 2022 merupakan upaya untuk mencapai target Renstra 2020 – 2024. Berikut perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2022 dengan target lima tahun.

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Lima Tahun

No	Indikator Kinerja	Tahun Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Tingkat Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	83,75%	83,75%
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	79,38%	105,84%
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100,91%	100,91%
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100,05%	100,05%
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100,42%	100,42%
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5	5	5	5	5	4,69 (Sangat Memuaskan)	93,80%
8	Hasil Evaluasi AKIP	86 (A)	87 (A)	88 (A)	89 (A)	90,05 (A)	94,85 (AA)	105,33%
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%	94,44%	94,44%
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	110,00%	110%

11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,69 (Memuaskan)	97,11%
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87,50%	88%	88,50%	89,70%	90,10%	100,45%

1. Tingkat Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan, yaitu internal satuan kerja melalui *quality control* (QC) dan *quality assurance* (QA), eksternal satuan kerja melalui evaluasi Direktorat EPP, dan hasil reviu Inspektorat Utama. Indikator ini bertujuan untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan melalui pengukuran yang dilakukan setelah pemeriksaan berakhir. Pemenuhan QC dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP), yaitu Ketua Tim, Pengendali Teknis, dan Penanggung Jawab. Pemenuhan QA dilakukan oleh Pejabat Struktural Pemeriksa (PSP), yaitu Kepala Subauditorat dan Kepala Perwakilan.

Tabel 5. Perkembangan Capaian IKU 1 Tahun 2020 – 2024

IKU 1 Tingkat Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	81,67%	88,67%	83,75%	#NA	#NA
Capaian	81,67%	88,67%	83,75%	#NA	#NA
Persentase Realisasi Tahunan terhadap target Tahun 2024	81,67%	88,67%	83,75%	#NA	#NA

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tahun 2022 sebesar 83,75% dari target sebesar 100%. Hal ini menunjukkan capaian IKU Tingkat Pemenuhan Pengendalian sebesar 83,75%. Realisasi tersebut diperoleh berdasarkan nilai QA dan QC yang terealiasi sebesar 100%, hasil evaluasi dari Direktorat EPP sebesar 67,50%, dan hasil reviu Inspektorat Utama sebesar 100%.

Jika dibanding dengan tahun sebelumnya, realisasi IKU pada tahun 2022 lebih rendah. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan oleh hasil evaluasi Direktorat EPP atas 15 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan yang terbit pada semester I tahun 2022. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan belum terpenuhinya aspek akurasi untuk 10 LHP. Selain itu, 15 LHP juga dinilai kurang memenuhi aspek konsistensi.

Untuk mendorong capaian IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan berupaya meningkatkan aspek akurasi melalui reviu silang maupun pembentukan tim verifikasi LHP. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat juga akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Direktorat EPP guna meningkatkan capaian terkait aspek konsistensi. Untuk melaksanakan indikator ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp6.762.227.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.655.123.614,00 atau 98,42%.

Realisasi IKU ini baru mencapai 83,75% dari target tahun 2024. Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berharap target IKU ini dapat tercapai sepenuhnya pada tahun 2024.

Gambar 3. Penyerahan LHP LKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat TA 2021

2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator kinerja ini mengukur hasil evaluasi antara kesesuaian simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan satuan kerja dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2), yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas LHP BPK.

Tabel 6. Perkembangan Capaian IKU 2 Tahun 2020 – 2024

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	#NA	#NA

Capaian	100%	100%	100%	#NA	#NA
Persentase Realisasi Tahunan terhadap target Tahun 2024	100%	100%	100%	#NA	#NA

Realisasi IKU Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan Tahun 2022 sebesar 100% dari target sebesar 100%. Hal ini menjukkan capaian realisasi IKU Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Haparapan Penugasan Tahun 2022 sebesar 100%. Realisasi tersebut diperoleh berdasarkan kesesuaian jumlah LHP yang diterbitkan dengan harapan penugasan.

Tingkat realisasi IKU ini pada tahun 2022 memiliki tingkat realisasi yang sama dengan tahun sebelumnya. Ketercapaian target IKU ini diraih karena seluruh penugasan pemeriksaan menghasilkan output LHP yang sesuai dengan harapan penugasan dalam P2. Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan terus berupaya untuk melaksanakan seluruh kegiatan pemeriksaan yang telah direncanakan. Dalam rangka melaksanakan indikator ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.473.864.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.426.570.198,00 atau 96,79%.

Realisasi IKU ini telah mencapai 100% dari target tahun 2024. Dengan menerapkan upaya tersebut di atas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berharap capaian ini dapat dipertahankan hingga tahun 2024.

3. Tingkat Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator kinerja ini menunjukkan tingkat kepatuhan entitas pemeriksaan, dalam hal ini Pemerintah Daerah, untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK diharapkan berdampak atas perbaikan tata kelola keuangan negara. Indikator ini bertujuan mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian TLRHP BPK. Dalam indikator ini, rekomendasi hasil pemeriksaan digolongkan ke dalam empat kategori.

Tabel 7. Perkembangan Capaian IKU 3 Tahun 2020 – 2024

IKU 3 Tingkat Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75%	75%	75%	75%	75%
Realisasi	80,51%	80,77%	79,38%	#NA	#NA
Capaian	107,35%	107,69%	105,84%	#NA	#NA
Persentase Realisasi Tahunan terhadap target Tahun 2024	107,35%	107,69%	105,84%	#NA	#NA

Realisasi IKU Tingkat Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2022 sebesar 79,38% dari target sebesar 75%. Hal ini menunjukkan capaian IKU Tingkat Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2022 sebesar 105,84%. Capaian tersebut diukur berdasarkan realisasi penggabungan dari:

a. jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjut sebanyak 10.142 rekomendasi;
b. jumlah rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti atau masih dalam proses ditindaklanjuti sebanyak 2.487 rekomendasi;
c. jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 167 rekomendasi; dan
d. jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 78 rekomendasi, dari total 12.874 rekomendasi yang disampaikan kepada entitas pemeriksaan selama periode Tahun 2005 sampai dengan 2022.

Jika dibanding dengan tahun sebelumnya, tingkat realisasi IKU ini pada tahun 2022 memiliki tingkat realisasi yang lebih rendah. Namun demikian, ketercapaian IKU ini telah melebihi target tahun 2022. Hal ini berkat komitmen dan peran aktif BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dalam hal ini aplikasi Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL), mampu mempercepat entitas pemeriksaan dalam melakukan peremajaan data tindak lanjut secara online di wilayahnya masing-masing. Untuk pelaksanaan indikator ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp204.840.000,00 dengan realisasi sebesar Rp204.793.139,00,00 atau 99,98%.

Realisasi IKU ini telah melebihi target tahun 2022. Dengan tetap melakukan upaya-upaya di atas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berharap capaian ini dapat dipertahankan hingga tahun 2024.

Diagram 8. Status Tindak Lanjut BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat s.d. Tahun 2022

4. **Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional**

Indikator ini mengukur keterlibatan satuan kerja dalam pelaksanaan pemeriksaan tematik nasional berdasarkan arahan Pimpinan BPK. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN. Indikator kinerja ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D, dan SDG's. Indikator ini dipenuhi dengan melakukan pembobotan antara perencanaan pemeriksaan, realisasi pemeriksaan, dan jumlah pemeriksa yang terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional tersebut.

Tabel 8. Perkembangan Capaian IKU 4 Tahun 2020 – 2024

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	101,10%	100,41%	100,91%	#NA	#NA
Capaian	101,10%	100,41%	100,91%	#NA	#NA
Persentase Realisasi Tahunan terhadap target Tahun 2024	101,10%	100,41%	100,91%	#NA	#NA

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Tahun 2022 sebesar 100,91% dari target sebesar 100%. Hal ini menunjukkan capaian IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Tahun 2022 sebesar 100,91%. Capaian ini diukur berdasarkan keterlibatan PFP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam pemeriksaan tematik nasional, yang diukur berdasarkan bobot masing-masing peran dalam Tim Pemeriksaan.

Tingkat realisasi IKU ini pada tahun 2022 lebih tinggi jika dibanding tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut disebabkan oleh keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam tiga pemeriksaan tematik nasional, yaitu:

a. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial BLT Desa;
b. Pemeriksaan Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman; dan
c. Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Dalam pelaksananan pemeriksaan tersebut, PFP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat terlibat sebagai penanggung jawab, wakil penanggung jawab, pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim dalam komposisi tim. Dalam pelaksanaan indikator ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp733.527.000,00 dengan realisasi sebesar Rp698.124.642,00 atau 95,17%.

Realisasi IKU ini telah melebihi target tahun 2022. Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini hingga tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan mendukung seluruh kebijakan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Pimpinan BPK.

Gambar 4. Penyerahan LHP Semester II Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

Indikator kinerja ini menunjukkan sejauh mana BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan, seperti lembaga perwakilan, aparat penegak hukum (APH), maupun permintaan dari BPK Pusat. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat respons BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Pemenuhan indikator ini dilakukan melalui pembobotan jumlah pemeriksaan dari pemangku kepentingan yang disetujui dan dipenuhi oleh BPK dan pemeriksaan yang melibatkan pemeriksa pada satuan kerja pemeriksaan terkait.

Tabel 9. Perkembangan Capaian IKU 5 Tahun 2020 – 2024

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100,43%	100,05%	#NA	#NA
Capaian	100%	100,43%	100,05%	#NA	#NA
Persentase Realisasi Tahunan terhadap target Tahun 2024	100%	100,43%	100,05%	#NA	#NA

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan pada Tahun 2022 sebesar 100,05% lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan capaian IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan pada Tahun 2022 sebesar 100,05%. Hal ini juga mengindikasikan kontribusi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam

memenuhi pemeriksaan yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan, dalam hal ini sesuai arahan dari Pimpinan BPK.

Tingkat realisasi IKU ini pada tahun 2022 lebih rendah jika dibanding tahun sebelumnya. Capaian tersebut diraih melalui kontribusi salah satu PFP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang mengikuti pemeriksaan yang ditetapkan sesuai arahan Pimpinan BPK, yaitu Pemeriksaan atas Laporan Keuangan International Atomic Energy Agency (IAEA) Tahun 2021 di Jakarta berdasarkan penugasan Ketua BPK melalui Surat Tugas Nomor 97/ST/X/12/2021 tanggal 28 Desember 2021. Namun demikian, perbedaan jumlah hari penugasan dalam pemeriksaan tersebut mengakibatkan capaian indikator tahun ini lebih rendah dari tahun lalu. Untuk melaksanakan indikator ini pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat tidak mengalokasikan anggaran karena seluruh biaya pemeriksaan tersebut dibebankan kepada BPK Pusat.

Realisasi IKU ini telah melebihi target tahun 2022. Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini hingga tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan mendorong PFP untuk mengikuti seleksi pemeriksaan dari pemangku kepentingan yang diumumkan melalui nota dinas Sekretaris Jenderal.

6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini mengukur kontribusi satker dalam pelaksanaan pemeriksaan tematik lokal. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Indikator ini dipenuhi melalui pembobotan antara perencanaan pemeriksaan, realisasi pemeriksaan, dan jumlah pemeriksa yang terlibat dalam pemeriksaan tematik lokal tersebut.

Tabel 10. Perkembangan Capaian IKU 6 Tahun 2020 – 2024

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100,28%	100,42%	#NA	#NA
Capaian	100%	100,28%	100,42%	#NA	#NA
Persentase Realisasi Tahunan terhadap target Tahun 2024	100%	100,28%	100,42%	#NA	#NA

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2022 sebesar 100,42% dari target sebesar 100%. Hal ini menunjukkan capaian realisasi IKU tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2022 sebesar 100,42%. Capaian ini diukur berdasarkan keterlibatan PFP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam pemeriksaan tematik lokal, yang diukur berdasarkan bobot masing-masing peran dalam Tim Pemeriksaan.

Realisasi IKU ini pada tahun 2022 lebih tinggi jika dibanding tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut disebabkan oleh keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam pemeriksaan atas Kinerja Penanggulangan Kemiskinan (LFAR) dengan komposisi tim mulai dari penanggung jawab, wakil penanggung jawab, pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim, yang seluruhnya merupakan PFP pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Dalam pelaksanaan indikator ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp155.663.000,00 dengan realisasi sebesar Rp153.136.047,00 atau 98,38%.

Realisasi IKU ini telah melebihi target tahun 2022. Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini hingga tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan mendukung seluruh kebijakan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Pimpinan BPK.

7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini mengukur sejauh mana pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat memahami visi, misi, nilai dasar BPK, dan pengimplementasiannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Capaian indikator ini diukur melalui survei yang dilakukan oleh Direktorat PSMK melalui pihak ketiga.

Tabel 11. Perkembangan Capaian IKU 7 Tahun 2020 – 2024

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	5	5	5	5	5
Realisasi	4,58	4,59	4,69	#NA	#NA
Capaian	91,60%	91,80%	93,80%	#NA	#NA
Persentase Realisasi Tahunan terhadap target Tahun 2024	91,60%	91,80%	93,80%	#NA	#NA

Realisasi IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2022 sebesar 4,69 (Sangat Memuaskan) dari target sebesar 5. Hal ini menunjukkan tingkat capaian realisasi IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK sebesar 93,80%. Hal ini mengindikasikan pemahaman pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat terhadap nilai dasar sangat memuaskan.

Tingkat realisasi IKU ini pada tahun 2022 lebih tinggi jika dibanding tahun sebelumnya. Ketidaktercapaian target ini disebabkan oleh beberapa pegawai yang belum memahami nilai dasar BPK secara penuh. Untuk mendorong peningkatan capaian, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan terus meningkatkan pemahaman pegawai atas nilai-nilai dasar BPK. Pada setiap kesempatan pertemuan dengan pegawai, Pimpinan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan selalu mengingatkan para pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan menjunjung tinggi nilai dasar BPK. Untuk melaksanakan indikator ini pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp21.568.460.000,00 dengan realisasi sebesar Rp21.406.160.739,00 atau 99,25%.

Realisasi IKU ini telah mencapai 93,80% dari taget tahun 2024. Dengan menerapkan berbagai langkah di atas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berharap IKU ini dapat tercapai sepenuhnya pada tahun 2024.

Gambar 5. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas

8. Hasil Evaluasi AKIP

Indikator kinerja ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja satker BPK. Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Utama dengan kategorisasi nilai berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015. Dalam permenpan tersebut, terdapat lima komponen penilaian, yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian.

Tabel 12. Perkembangan Capaian IKU 8 Tahun 2020 – 2024

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	86 (A)	87 (A)	88 (A)	89 (A)	90,05 (A)
Realisasi	92,75 (AA)	95,87 (AA)	94,85 (AA)	#NA	#NA
Capaian	107,85%	110,20%	107,78%	#NA	#NA
Persentase Realisasi Tahunan terhadap target Tahun 2024	103%	106,46%	105,33%	#NA	#NA

Tingkat realisasi IKU Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 sebesar 94,85 (Sangat Memuaskan) dari target sebesar 88 (Memuaskan). Hal ini menunjukkan capaian IKU Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 sebesar 105,33%. Penilaian tersebut diperoleh berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Utama atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Tingkat realisasi IKU ini pada tahun 2022 masih lebih rendah jika dibanding tahun sebelumnya. Komponen penilaian yang belum memberikan hasil optimal terdapat pada komponen pengukuran, pelaporan, dan capaian. Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan beberapa upaya, seperti sosialisasi nilai-nilai dasar BPK dan budaya kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Subbagian SDM, selaku unit kerja pengampu IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi, telah menyampaikan laporan monitoring diklat melalui atasan langsung, mengingatkan, dan mengimbau para pegawai untuk memenuhi JP diklat minimum. Dalam rangka melaksanakan indikator ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran senilai Rp1.470.895.000,00 dengan realisasi senilai Rp1.468.252.729,00 atau 99,82%.

Realisasi IKU ini telah melebihi target tahun 2022. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berharap capaian ini dapat dipertahankan hingga tahun 2024.

9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Indikator ini mengukur pemanfaatan layanan teknologi dan informasi oleh seluruh pegawai. Tujuannya untuk mendorong satuan kerja agar memanfaatkan layanan teknologi dan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan. Indikator ini dipenuhi melalui pengukuran pemanfaatan layanan aplikasi SISDM, Jasmin, SMP, SiAP dan SiPTL.

Tabel 13. Perkembangan Capaian IKU 9 Tahun 2020 – 2024

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95%	96%	97%	98%	100%
Realisasi	99,19%	99,19%	94,44%	#NA	#NA
Capaian	104,41%	103,32%	97,36%	#NA	#NA
Persentase Realisasi Tahunan terhadap target Tahun 2024	99,19%	99,19%	94,44%	#NA	#NA

Realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2022 sebesar 94,44% dari target sebesar 97%. Hal ini menunjukkan capaian tingkat realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2022 sebesar 94,44%. Capaian tersebut diukur berdasarkan realisasi penggabungan dan pembobotan dari:

a. pemanfaatan layanan aplikasi SISDM 20%;
b. pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN 13,34%;
c. pemanfaatan layanan aplikasi SMP 20%;
d. pemanfaatan layanan aplikasi SiAP 16,71%; dan
e. pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL 24,39%.

Tingkat realisasi IKU ini pada tahun 2022 lebih rendah jika dibanding tahun sebelumnya. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan oleh:

a. perubahan komponen-komponen pengukuran untuk tahun 2022 (Nota dinas Kepala Direktorat PSMK nomor 745/ND/XII.1/12/2022 tanggal 12 Desember 2022)
b. kurangnya pemahaman para pejabat struktural terkait alur aplikasi Jasmin; dan

c. adanya PFP yang tidak melakukan aktivitas pada aplikasi SiAP.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan berupaya mendorong pemanfaatan teknologi informasi melalui sosialisasi, pendampingan, ataupun mentoring. Untuk melaksanakan indikator ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran senilai Rp188.880.000,00 dengan realisasi senilai Rp188.802.982,00 atau 99,96%.

Dengan menerapkan upaya-upaya di atas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berharap target IKU ini dapat tercapai sepenuhnya pada tahun 2024.

10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Indikator ini mengukur praktik manajemen pengetahuan satuan kerja, khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan, dan penerapan pengetahuan. Terdapat dua komponen yang harus dipenuhi dalam pengukuran indikator ini, yaitu penyusunan/penerapan *Best Practice* (bobot 50%) dan pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan (bobot 50%).

Tabel 14. Perkembangan Capaian IKU 10 Tahun 2020 – 2024

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	110%	#NA	#NA
Capaian	100%	100%	110%	#NA	#NA
Persentase Realisasi Tahunan terhadap target Tahun 2024	100%	100%	110%	#NA	#NA

Realisasi IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2022 sebesar 110% dari target sebesar 100%. Hal ini menjukkan capaian realisasi IKU Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2022 sebesar 110%. Capaian tersebut diperoleh berdasarkan realisasi penggabungan dan pembobotan dari penyusunan/penerapan Best Practice (100%) dan pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan (110%).

Realisasi IKU ini pada tahun 2022 lebih tinggi jika dibanding tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut disebabkan oleh disetujuinya usulan Best Practice Dashboard Klinik Pengadaan melalui Nota Dinas Kepala Direktorat PSMK Nomor 707/ND/XII.1/1/2022 tanggal 24 November 2022. Kreatifitas para pegawai dalam implementasi manajemen pengetahuan diterapkan melalui kegiatan diklat, KTF/*expose*, bantuan rekan sejawat, mentoring, maupun sosialisasi. Untuk melaksanakan indikator ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp286.452.000,00 dengan realisasi sebesar Rp285.152.084,00 atau 99,55%.

Realisasi IKU ini telah melebihi target tahun 2022. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berharap capaian ini dapat dipertahankan hingga tahun 2024.

Gambar 7. Diklat Persiapan Pemeriksaan LKPD TA 2021

Gambar 6. Pengarahan Anggota I BPK RI

Gambar 8. *Knowledge Transfer Forum* dengan ANAO

11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Komunikasi dilakukan melalui Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) yang ada di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. PIK memberikan layanan informasi dan layanan pengaduan masyarakat sehingga masyarakat dapat setiap saat menghubungi PIK, baik datang secara langsung maupun secara *online*. Capaian indikator ini diukur melalui survei yang dilakukan oleh Direktorat PSMK melalui pihak ketiga.

Tabel 15. Perkembangan Capaian IKU 11 Tahun 2020 – 2024

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Realisasi	3,81	3,91	3,69	#NA	#NA
Capaian	100,26%	102,89%	97,11%	#NA	#NA
Persentase Realisasi Tahunan terhadap target Tahun 2024	100,26%	102,89%	97,11%	#NA	#NA

Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi Tahun 2022 sebesar 3,69 dari target sebesar 3,8. Hal ini menunjukkan tingkat realisasi IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi sebesar 97,11%. Hal ini mengindikasikan persepsi para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berada pada rentang memuaskan.

Tingkat realisasi IKU ini pada tahun 2022 lebih rendah jika dibanding tahun sebelumnya. Untuk mendorong peningkatan capaian, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan mengintensifkan komunikasi dengan entitas pemeriksaan, media, lembaga pendidikan, masyarakat, dan lain-lain melalui sarana komunikasi yang tersedia di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, baik secara tatap muka maupun *online*. Untuk melaksanakan indikator ini pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp303.213.000,00 dengan realisasi sebesar Rp302.865.727,00 atau 99,89%.

Realisai indikator ini telah mencapai 97,11% dari target tahun 2024. Dengan menerapkan upaya-upaya tersebut di atas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berharap target IKU ini dapat dicapai sepenuhnya di tahun 2024.

12. Tingkat Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

IKU ini mengukur pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan diklat. Tujuannya adalah untuk mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi seluruh pegawai BPK. Peningkatan kompetensi pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dilakukan melalui kegiatan diklat secara *off class* atapun *distance learning*, seminar, maupun workshop, baik yang diselenggarakan oleh BPK maupun

pihak luar. Syarat pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi adalah 40 jam pelajaran untuk PFP dalam satu tahun dan 20 jam pelajaran dalam satu tahun untuk pegawai non-pemeriksa.

Tabel 16. Perkembangan Capaian IKU 12 Tahun 2020 – 2024

IKU 12 Tingkat Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	97,17%	98,02%	100%	#NA	#NA
Capaian	97,17%	98,02%	100%	#NA	#NA
Persentase Realisasi Tahunan terhadap target Tahun 2024	97,17%	98,02%	100%	#NA	#NA

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2022 sebesar 100% dari target sebesar 100%. Hal ini menunjukkan capaian realiasai IKU Tingkat Pemenuhan Jam Diklat Tahun 2022 sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan seluruh pegawai telah memenuhi jam pembelajaran minimum yang disyaratkan indikator ini.

Realisasi IKU ini pada tahun 2022 lebih tinggi jika dibanding tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut disebabkan Subbagian SDM, selaku pengampu IKU ini, yang aktif:

a. menyampaikan laporan monitoring diklat melalui atasan langsung, mengingatkan, dan mengimbau para pegawai untuk memenuhi JP diklat minimum;
b. melaksanakan diklat *off class* di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk pemeriksa bekerjasama dengan Bandiklat PKN; dan
c. melaksanakan sosialisasi BIDICS SSA bekerjasama dengan Biro TI.

Untuk melaksanakan indikator ini pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp286.452.000,00 dengan realisasi sebesar Rp285.152.084,00 atau 99,55%.

Realisasi IKU ini telah mencapai 100% dari target tahun 2024. Dengan menerapkan berbagai langkah di atas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berharap capaian ini dapat dipertahankan hingga tahun 2024.

13. Tingkat Kinerja Anggaran

Tingkat kinerja anggaran mengukur capaian kinerja satuan kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri. Indikator ini dipenuhi melalui pembobotan dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK terkait pemeriksaan maupun layanan pemeriksaan.

Tabel 17. Perkembangan Capaian IKU 12 Tahun 2020 – 2024

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	87%	87,50%	88%	88,50%	89,70%
Realisasi	91,86%	91,20%	90,10%	#NA	#NA
Capaian	105,59%	104,23%	102,39%	#NA	#NA
Persentase Realisasi Tahunan terhadap target Tahun 2024	102,41%	101,67%	100,45%	#NA	#NA

Realisasi IKU Tingkat Kinerja Anggaran Tahun 2022 sebesar 90,10% dari target sebesar 88%. Hal ini menunjukkan capaian realisasi IKU Tingkat Kinerja Anggaran Tahun 2022 sebesar 102,39%. Capaian tersebut diperoleh dari nilai EKA sebesar 84,72% dan nilai EPA sebesar 95,97% melalui nota dinas Sekretaris Jenderal BPK RI.

Tingkat realisasi IKU ini pada tahun 2022 lebih rendah jika dibanding tahun sebelumnya namun secara keseluruhan melebihi target tahun 2022. Ketercapaian indikator ini disebabkan oleh upaya-upaya untuk meminimalisasi deviasi halaman 3 DIPA dan mengoptimalkan kebijakan pemerintah terkait pemblokiran anggaran atau *automatic adjustment*. Upaya optimalisasi di antaranya:

a. pengurangan volume RO LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan dari semula 166 LHP menjadi 158 LHP;
b. penambahan volume RO Layanan Sarana Internal dari semula 17 unit menjadi 23 unit;
c. penambahan volume RO LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dari semula 18 LHP menjadi 20 LHP; dan
d. penambahan volume RO LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dari semula 19 laporan menjadi 30 laporan.

Untuk melaksanakan indikator ini pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp21.568.460.000,00 dengan realisasi sebesar Rp21.406.160.739,00 atau 99,25%.

Realisasi IKU ini telah melebihi target tahun 2024. Dengan menerapkan berbagai langkah di atas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berharap capaian ini dapat dipertahankan hingga tahun 2024.

C. ANALISIS EFISIENSI

Dalam rangka mewujudkan pencapaian strategi peningkatan pemeriksaan bermutu tinggi serta pemberian pelayanan prima kepada stakeholder, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya efisiensi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut.

1. Optimalisasi Anggaran
   a. Pengurangan volume RO LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik dari semula 166 LHP menjadi 158 LHP. Kelebihan anggaran sebagai dampak dari pengurangan RO tersebut dialokasikan untuk penambahan objek pemeriksaan; dan
   b. perubahan mekanisme penyelesaian tagihan kegiatan pemeriksaan. Hal ini sedikit menghambat penyerapan anggaran karena proses adaptasi. Namun, perubahan ini meningkatan kemandirian PFP dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakannya.
2. Pemanfaatan TI
   a. Optimalisasi penggunaan aplikasi SiAP sebagai alat bantu dalam pengelolaan kertas kerja secara elektronik;
   b. optimalisasi pemanfaatan aplikasi SiPTL dalam pelaksanaan pemantauan. Seluruh entitas pemeriksaan dapat mengakses dan meng-*update* posisi terkini TLRHP dari wilayah kerjanya masing-masing. Hal ini mendorong efisiensi biaya dan fleksibilitas waktu;
   c. optimalisasi penggunaan aplikasi Jasmin. Penggunaan aplikasi Jasmin mendorong pengurangan bahkan peniadaan penggunaan kertas dan peralihan sepenuhnya ke konsep digital;
   d. optimalisasi penggunaan SISDM sebagai sarana penyimpanan digital seluruh data dan dokumen kepegawaian. Hal ini mendorong efisiensi waktu ketika data maupun dokumen tersebut diperlukan sebagai persyaratan-persyaratan administratif; dan
   e. pemanfaatan Portal BPK secara optimal sebagai sarana berbagi data dan dokumen. Pemanfaatan Portal BPK mendorong kemudahan akses bagi pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang ingin mengkases data dan dokumen dari mana pun.

D. PERUBAHAN BUDAYA KERJA

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melakukan perubahan budaya kerja pada tahun 2021, dari semula menggunakan slogan SSSIIP (Senyum, Salam Sapa, Independensi, Integritas, Profesionalisme) menjadi TEGAS (*Trust, Educate, Good Governance, Accountable, Synergy*). Dalam rangka pengimplementasian slogan ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan beberapa kegiatan, seperti penyusunan buku saku budaya kerja, sosialisasi budaya kerja kepada pegawai, pengarahan, dan pengimplementasian budaya kerja oleh pelaksana pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam layanan-layanan terkait tugas dan fungsi.

Budaya kerja merupakan cerminan, bentuk penerapan dalam tindakan atas nilai-nilai dasar dan, upaya membangun kebiasaan baik dalam organisasi. Sembilan dari 13 indikator kinerja dapat tercapai dengan baik bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan upaya-upaya yang ditempuh untuk mencapai target merupakan bagian dari implementasi budaya kerja TEGAS.

E. REALISASI ANGGARAN

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat memiliki pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp20.348.811.000,00. Sepanjang tahun 2022, terdapat penambahan anggaran pemeriksaan dan belanja pegawai terkait tunjangan fungsional sehingga anggaran menjadi Rp21.568.460.000,00.

Tabel 18. Perbandingan Realisasi Anggaran, Rincian Output, dan Indikator Kinerja Tahun 2022

No.	Anggaran (Setelah Perubahan)	Realisasi Anggaran	Realisasi Rincian Output
1	207.143.000,00	206.611.000,00	20 Unit
2	11.846.587.000,00	11.814.938.816,00	1 Layanan
3	384.857.000,00	384.855.000,00	23 Unit
4	9.129.873.000,00	8.999.755.923,00	319 Laporan
	21.568.460.000,00	**21.406.160.739,00**	

Tabel di atas menunjukkan penyerapan anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat TA 2022 adalah sebesar Rp21.406.160.739 atau 99,25% dari pagu anggaran yang sebesar Rp21.568.460.000. Secara umum, tidak ada hambatan signifikan yang dihadapi oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai target anggaran yang telah ditetapkan.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengikuti kebijakan pemerintah terkait pemblokiran anggaran atau *automatic adjustment*. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat juga melakukan perubahan mekanisme penyelesaian tagihan kegiatan pemeriksaan yang mengharuskan PFP untuk menyusun sendiri pertangungjawaban keuangannya. Perubahan tersebut bertujuan agar PFP dapat lebih mandiri dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakannya. Hal ini berdampak pada proses penyelesaian tagihan dan penyerapan anggaran karena para pemeriksa masih beradaptasi dengan perubahan mekanisme yang ada. Sebagai akibatnya, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan yang tertuang dalam Rencana Penarikan Dana (RPD) masih kurang baik.

Seluruh unit kerja berkomitmen untuk selalu menjaga konsitensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan yang telah ditetapkan. Ketersediaan sarana prasarana yang memadai, sumber daya manusia, dan komitmen seluruh pegawai untuk mencapai target kinerja turut mendukung pencapaian realisasi anggaran dan output tersebut.

F. INOVASI

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan kegiatan-kegiatan inovasi dan penyempurnaan-penyempurnaannya sampai saat ini.

1. Klinik Pengadaan

sejak September 2021

Inovasi klinik pengadaan berguna sesuai dengan tujuannya, yakni untuk memudahkan para pihak yang berkepentingan mempelajari berbagai aplikasi yang digunakan dalam PBJ. Inovasi Dashboard Klinik Pengadaan pada tahun 2022 diusulkan sebagai *best practice* dan telah disetujui melalui Nota Dinas Kepala Direktorat PSMK Nomor 707/ND/XII.1/1/2022 tanggal 24 November 2022.

Dashboard Klinik Pengadaan dapat diakses melalui tautan https://sites.google.com/view/klinikpengadaanbpk/home?authuser=0&pli=1

2. Portal Internal Terpadu-Keuangan (Point-K)

sejak Maret 2022

Portal Internal Terpadu-Keuangan merupakan media berbasis web pada Portal BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang disusun untuk membantu pelaksana BPK, khususnya pemeriksa, dalam memahami tata cara pemrosesan SPJ dan penyusunan dokumen pertanggungjawaban beserta kelengkapannya sesuai ketentuan pembayaran yang disyaratkan. Saat ini, inovasi Point-K sedang dalam tahap pengembangan untuk menambah fitur pemantauan secara *online* terkait *progress* SPJ.

Point-K dapat diakses melalui tautan https://sites.google.com/view/point-k/home

3. Histori Pemeriksaan (Histoper)

sejak Juni 2022

Aplikasi Histoper menyajikan data-data pemeriksa, kompetensi, riwayat pemeriksaan, dan benturan kepentingan yang selanjutnya digunakan untuk keperluan penyusunan tim pemeriksaan.

Inovasi Histoper dapat diakses melalui tautan https://lookerstudio.google.com/reporting/0f5e6d07-3d67-4ba1-affb-b6b8ff161e58/page/p_1dh7x9kyvc

4. Monitoring Statistik LHKPN (Monistik-LHKPN)

sejak Maret 2022

Monistik-LHKPN adalah instrumen yang dikembangkan melalui Portal BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan monitoring kepatuhan penyampaian LHKPN oleh wajib lapor LHKPN. Monistik-LHKPN menyediakan data berupa daftar dan infografis, serta memberikan kecepatan dan kemudahan akses informasi.

Inovasi ini dapat diakses melalui tautan https://lookerstudio.google.com/reporting/5738d3b4-e0a2-4ec8-b4f3-770be2e2251d/page/WI6vC

5. BPK Kalbar Tanggap

sejak Juni 2021

BPK Kalbar Tanggap merupakan media informasi dan komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan masyarakat dan *stakeholder*. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan informasi atas kegiatan-kegiatan BPK, kebutuhan atas informasi data yang dimiliki BPK, dan forum komunikasi dengan BPK.

Media yang digunakan dalam inovasi ini adalah:
- situs web: https://kalbar.bpk.go.id;
- permintaan informasi: https://kalbar-ppid.bpk.go.id;
- pengaduan: https://kalbar-ppid.bpk.go.id/;
- instagram: @bpkri.kalbar; dan
- twitter: @bpkrikalbar.

6. Pojok SiPTL

sejak Januari 2019

Pojok SiPTL merupakan penataan ruang yang difungsikan sebagai area publik untuk membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan pemerintah daerah. Hal ini untuk mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan mengimplementasikan aplikasi SiPTL. Pojok SiPTL terletak di Lantai 1 Gedung Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

G. PENGHARGAAN

Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berhasil memperoleh dua penghargaan, yakni Satuan Kerja dengan Predikat Menuju WBK terkait pembangunan Zona Integritas (ZI) dan pemenang terbaik III dalam kegiatan Pemutakhiran Data Mandiri (PDM).

Pembangunan ZI pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sudah dimulai sejak tahun 2016 dengan melakukan penyusunan Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Kemudian pada tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mencanangkan BPK Kalbar Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Upaya-upaya yang dilaksanakan sejak tahun 2018 baru membuahkan hasil di tahun 2022 dengan ditetapkannya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebagai satuan kerja yang memperoleh predikat Menuju WBK melalui Nota Dinas Inspektur Utama Nomor 485/ND/XI/12/2022 tanggal 21 Desember 2022.

PDM berkaitan dengan peremajaan data ASN dan JPT Non-ASN secara elektronik yang dicanangkan sejak semester II tahun 2021 melalui Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 780/ND/X/07/2021. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melalui Subbagian SDM melakukan pendekatan-pendekatan informal kepada pegawai dan memberikan pendampingan teknis terkait penginputan data. Validasi dilakukan secara berjenjang dan dengan prinsip kehati-hatian sehingga data-data yang diunggah pegawai sesuai dengan yang disyaratkan. Karena upaya-upaya tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berhasil meraih predikat terbaik III dalam kegiatan PDM.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja untuk mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK RI. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berharap Laporan Kinerja ini dapat memberi informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Pencapaian skor kinerja tahun 2022, sebesar 99,76, mengalami penurunan sebesar 0,49 dibanding tahun 2021 yang mencapai skor kinerja 100,25.

Komitmen yang kuat untuk mencapai kinerja maksimal tergambar pada capaian terhadap indikator kinerja untuk 9 indikator yang mencapai target dan 4 indikator yang belum mencapai target, seperti yang tergambar pada tabel berikut.

Tabel 19. Indikator Kinerja yang Mencapai dan Belum Mencapai Target

Indikator Kinerja yang Mencapat Target	Indikator Kinerja yang Belum Mencapai Target
1. IKU 2 - Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;	1. IKU 1 - Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
2. IKU 3 - Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;	2. IKU 7 - Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
3. IKU 4 - Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;	3. IKU 9 - Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi; dan
4. IKU 5 - Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan;	4. IKU 11 - Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi.
5. IKU 6 - Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;	
6. IKU 8 - Hasil Evaluasi AKIP;	
7. IKU 10 - Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;	
8. IKU 12 - Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan	
9. IKU 13 - Tingkat Kinerja Anggaran.	

Hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja adalah:

1. LHP LKPD yang kurang konsisten dan akurat;
2. pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang belum memahami nilai-nilai dasar BPK secara memadai; dan
3. penggunaan aplikasi-aplikasi terkait pemeriksaan dan kesekretariatan yang belum optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Atas indikator kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan langkah-langkah atau rencana tindak lanjut berupa:

1. peningkatan aspek akurasi melalui reviu silang maupun pembentukan tim verifikasi LHP. Terkait aspek konsistensi, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Direktorat EPP;

2. peningkatan pemahaman pegawai atas nilai-nilai dasar BPK. Pada setiap kesempatan pertemuan dengan pegawai, Pimpinan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat selalu mengingatkan para pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan menjunjung tinggi nilai dasar BPK;
3. pendorongan pemanfaatan teknologi informasi melalui sosialisasi, pendampingan, ataupun mentoring; dan
4. intensifikasi komunikasi dengan entitas pemeriksaan, media, lembaga pendidikan, masyarakat, dan lain-lain melalui sarana komunikasi yang tersedia di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, baik secara tatap muka maupun *online*.

Dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kinerja di masa mendatang, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan langkah-langkah strategis berupa:

1. optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sehingga seluruh pemeriksaan dapat dilaksanakan, baik pemeriksaan yang bersifat mandatory, permintaan *stakeholders*, maupun pemeriksaan tematik nasional dan lokal sesuai arahan pimpinan;
2. internalisasi nilai-nilai dasar BPK dalam setiap kegiatan dengan melibatkan seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sehingga pegawai senantiasa memegang tinggi IIP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. optimalisasi komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sehingga segala permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah dapat segera teratasi, yang dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
4. optimalisasi penggunaan dan pengembangan aplikasi-aplikasi yang telah ada dan pengembangan aplikasi-aplikasi baru yang disesuaikan dengan kondisi di Provinsi Kalimantan Barat; dan
5. optimaliasai manajemen pengetahuan (*knowledge management*) di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melalui *knowledge sharing,* baik secara *online* maupun tatap muka.

LAMPIRAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmadi, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA., CFrA.
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara VI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

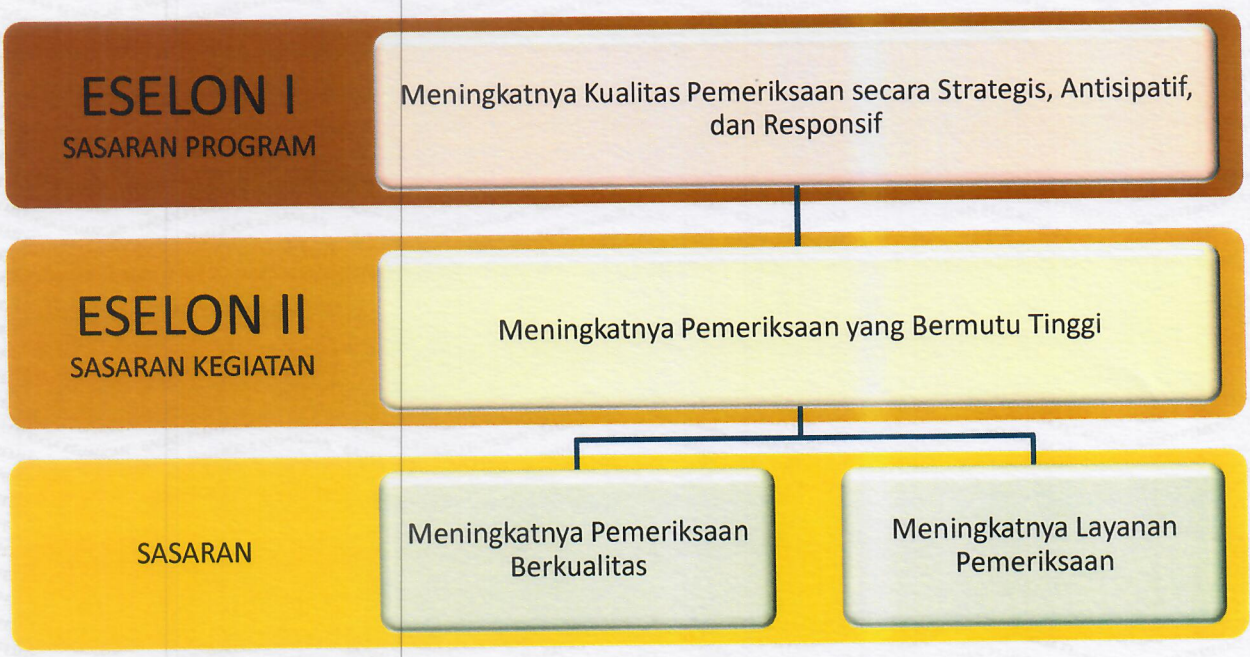

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2022

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Rp20.348.811.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
• Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Rp8.628.102.000	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
• Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Rp11.720.709.000	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%

Jakarta, Desember 2021

Pihak Kedua,

Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA., CFrA.

Pihak Pertama,

Rahmadi, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.

Diketahui oleh:
Anggota VI BPK,

Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., CSFA.

Wakil Ketua BPK,

Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CFrA., QGIA., CGCAE.

Ketua BPK,

Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE., QGIA.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

TAHUN 2022

Unit/Satuan Kerja : Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Tahun : 2022

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Strategi 2	**Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif**							
Sasaran	**Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi**							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	-	40%	40%	100%	Desember	Triwulan I: • Membentuk Tim Perencanaan dan Pengkaji Hasil Pemeriksaan • Membentuk Tim Reviu Triwulan II s.d. IV: • Melaksanakan pengarahan pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan LKPD/Kinerja/DTT • Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapming, diskusi dan koordinasi • Meningkatkan peran Kepala Subauditorat selaku PSP untuk melakukan QA yang menjamin pelaksanaan QC berjalan efektif • Mewajibkan tim pemeriksa menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dengan menyimpan secara manual dan elektronik • Evaluasi atas pelaksanaan pemeriksaan selama satu tahun
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	-	-	-	100%	Desember	Triwulan II dan IV: • Melaksanakan koordinasi dengan Direktorat EPP atas hasil evaluasi LHP terkait kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember	Triwulan I: • Membentuk Tim Dosir Triwulan II: • Melaksanakan pembahasan TLRHP Semester I dengna mengundang entitas untuk melaksanakan SiPTL Triwulan III: - Triwulan IV: • Melaksanakan pembahasan TLRHP Semester I dengna mengundang entitas untuk melaksanakan SiPTL
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	-	-	-	100%	Desember	Triwulan III sd IV: • Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional • Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sesuai arahan Badan
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	Triwulan IV: • Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan • Mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan • Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sesuai arahan Badan
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	-	-	-	100%	Desember	Triwulan I: • Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal • Melakukan koordinasi dengan Pokja terkait pelaksanaan pemeriksaan tematik lokal • Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sesuai arahan badan
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	-	-	-	Sangat Memuaskan (5,00)	Desember	Triwulan I s.d. IV : • Monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan • Monitoring penugasan pemeriksaan pada setiap pemeriksa tidak lebih dari tiga kali berturut di entitas yang sama sebagai bahan pertimbangan penugasan pemeriksaan LKPD.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								• Melaksanakan Pengarahan/Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi misi dan nilai dasar BPK serta budaya kerja
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	-	-	A (88,00)	A (88,00)	Desember	Triwulan I s.d. IV : • Melakukan evaluasi, memperbaiki dan meningkatkan hasil evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja tahun sebelumnya
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	25%	50%	75%	97%	Desember	Triwulan I s.d. IV : • Melaksanakan implementasi aplikasi-aplikasi yang telah disosialisasikan dalam tugas-tugas kedinasan
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	10%	20%	50%	100%	Desember	Triwulan I • Bantuan rekan sejawat penggunaan aplikasi “Form SPJ Perjalanan Dinas” oleh subbag Keuangan ke seluruh pemeriksa • Optimalisasi penggunaan portal untuk sharing data dan informasi terkait pemeriksaan maupun kesekretariatan
								Triwulan II: • Evaluasi Penerapan Best Practice tahun 2021 Aplikasi Monitoring Persediaan Obat Asmoro • Optimalisasi penggunaan portal untuk sharing data dan informasi terkait pemeriksaan maupun kesekretariatan
								Triwulan III: • Mengikuti KTF yang diselenggarakan Biro SDM • Reviu pasca aktivitas atas penggunaan aplikasi “Form SPJ Perjalanan Dinas” • Optimalisasi penggunaan portal untuk sharing data dan informasi terkait pemeriksaan maupun kesekretariatan
								Triwulan IV: • Evaluasi kegiatan atas penggunaan aplikasi “Form SPJ Perjalanan Dinas” • Optimalisasi penggunaan portal untuk sharing data dan informasi terkait pemeriksaan maupun kesekretariatan
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan	Memuaskan (3,80)	-	-	-	Memuaskan (3,80)	Desember	Triwulan I s.d. IV: • Melaksanakan layanan informasi dan pengaduan sesuai POS dan memberikan kuisioner kepuasaan yang diisi pemohon informasi

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja												Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I			TW II			TW III			TW IV				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)			(7)			(8)	(9)
	atas Kualitas Komunikasi															• Menjalin komunikasi dengan entitas terkait informasi/komunikasi sebelum dan setelah pemeriksaan
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	60 %	60 %	60 %	60 %	65 %	65 %	70 %	75 %	75 %	80 %	90 %	100 %	Desember	Januari : • Usulan calon peserta diklat TW I sesuai ND dari Badan/Balai Diklat • Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai • Pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat
																Februari : • pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.
																Maret : • Usulan calon peserta diklat TW II sesuai ND dari Badan/Balai Diklat • Pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.
																April : • Pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat • Melakukan monitoring dan evaluasi diklat TW I
																Mei : • Pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.
																Juni : • Usulan calon peserta diklat TW III sesuai ND dari Badan/Balai Diklat • Pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.
																Juli : • Pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. • Melakukan monitoring dan evaluasi diklat TW II
																Agustus : • Pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.
																September :

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja												Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I			TW II			TW III			TW IV				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)			(7)			(8)	(9)
																• Usulan calon peserta diklat TW III sesuai ND dari Badan/Balai Diklat • Pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.
																Oktober : • Pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. • Menginventarisi kebutuhan angka kredit dan jam diklat • Melakukan monitoring dan evaluasi diklat TW III
																November : • Pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.
																Desember : • Pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. • Melakukan monitoring dan evaluasi diklat TW IV
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	88%			88%			88%			88%			Desember	Triwulan I s.d. IV: • Menyusun Dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran • Menyusun data capaian output.
																Triwulan II dan IV • Menyusun laporan keuangan • Menyusun dokumen perencanaan anggaran tahun 2023

Scorecard Tahun 2022
(Aplikasi https://prisma.bpk.go.id)

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

PERIODE: DES / TW 4 / SEM 2 / TAHUN / 2022

Perjanjian Kinerja / Peta Strategi | Detail Scorecard | Indikator Kinerja Keluaran (IKK)

Expand | Refresh | Calculate | Export | Edit | Detail & Dokumen

Nama	Jenis	Periode	Target PK	Target	Realisasi	Score
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	Scorecard	Triwulan...				99.76
Sasaran Kegiatan. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Sasaran Strategis	Triwulan...				99.76
IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	83,75 %	83.75
IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	100,00 %	100
IKU 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	IKU	Triwulan...	75,00%	75,00%	79,38 %	105
IKU 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	100,91 %	100.91
IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	100,05 %	100.05
IKU 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	100,42 %	100.42
IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	IKU	Tahunan	5,00	5,00	4,69	93.8
IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP	IKU	Triwulan...	88,00	88,00	94,85	105
IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	IKU	Triwulan...	97,00%	97,00%	94,44 %	97.36
IKU 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	138,57 %	105
IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	IKU	Tahunan	3,80	3,80	3,69	97.11
IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	IKU	Bulanan	100,00%	100,00%	100,00 %	100
IKU 13. Tingkat Kinerja Anggaran	IKU	Triwulan...	88,00%	88,00%	90,10 %	102.39

NOTA DINAS
No. 745 /ND/XII.1/12/2022

Kepada Yth.	:	1. Para Kepala Biro 2. Para Kepala Inspektur 3. Para Kepala Pusat 4. Para Kepala Direktorat 5. Para Kepala Auditorat 6. Para Kepala Perwakilan
Dari	:	Kepala Direktorat PSMK
Lampiran	:	Satu berkas
Perihal	:	Penyampaian Informasi Pembaharuan Pengukuran Indikator Kinerja Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
Tempat, Tanggal	:	Jakarta, 12 Desember 2022

Menindaklanjuti hasil diskusi terpumpun Evaluasi IKU pada Forum Pengelola Implementasi Renstra 2022 tanggal 27 Oktober 2022 terkait realisasi indikator kinerja Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi (TI) pada Triwulan III Tahun 2022 yang masih jauh di bawah target, bersama ini kami sampaikan reformulasi pengukuran indikator kinerja Tingkat Pemanfaatan TI (terlampir) dengan mempertimbangkan masukan dari Unit/Satuan Kerja Pengelola Kinerja dan Satker Pengampu Aplikasi (dhi. Biro TI dan Direktorat EPP). Kami berharap reformulasi ini dapat membantu para pengelola kinerja pada Unit dan Satuan Kerja untuk mengupayakan ketercapaian target indikator kinerja Tingkat Pemanfaatan TI Tahun 2022.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Direktorat PSMK,

Felicia Yudhaningtyas
NIP 196907141989032001

NOTA DINAS
Nomor 267/ND/XIX.PNK/10/2022

Kepada	:	Inspektur Utama
Dari	:	Plh. Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Lampiran	:	1 berkas
Perihal	:	Pemutakhiran budaya kerja pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Tempat, Tanggal	:	Pontianak, 28 Oktober 2022

Menindaklanjuti Nota Dinas Bapak Nomor 416/ND/XI/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 perihal Pemutakhiran Budaya Kerja Satuan Kerja/Unit Kerja di BPK dengan hormat kami sampaikan pemutakhiran budaya kerja pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana terlampir. Dapat kami sampaikan bahwa *tagline* budaya kerja pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah dilakukan perubahan pada Tahun 2021, semula menggunakan *tagline* SSSIIP (Senyum, Salam, Sapa, Independensi, Integritas, Profesionalisme) menjadi TEGAS (*Trust, Educate, Good governance, Accountable, Synergi*).

Dalam mengimplementasikan budaya kerja pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, telah dilaksanakan serangkaian kegiatan diantaranya penyusunan buku saku budaya kerja, sosialisasi kepada pegawai terkait budaya kerja, pengarahan pegawai serta implementasi budaya kerja tersebut dalam layanan-layanan oleh pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Perwakilan,

R.M Heribertus Kurniawan
NIP. 197406301994011001

Realisasi Angaran Tahun 2022
(Aplikasi https://prisma-pelaporan.bpk.go.id)

REALISASI ANGGARAN PERIODE 12 / 2022
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

KODE RKA/KL	DIPA/PROGRAM/KEGIATAN/ KELUARAN/SUBKELUARAN/KOMPONEN	REALISASI ANGGARAN					
		PAGU	REALISASI S.D. BULAN LALU	RPD BULAN INI	REALISASI BULAN INI	REALISASI S.D. BULAN INI	SISA S.D. BULAN INI
CI	PROGRAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA	21.568.460.000	19.447.169.661	1.799.231.543	1.958.991.078	21.406.160.739	162.299.261
1043	PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DAN PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA	21.568.460.000	19.447.169.661	1.799.231.543	1.958.991.078	21.406.160.739	162.299.261
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	207.143.000	206.611.000	532.000	0	206.611.000	532.000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	11.846.587.000	11.121.922.778	724.664.222	693.016.038	11.814.938.816	31.648.184
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	384.857.000	384.855.000	0	0	384.855.000	2.000
FAF	Pemeriksaan Keuangan Negara	9.129.873.000	7.733.780.883	1.074.035.321	1.265.975.040	8.999.755.923	130.117.077

Realisasi Keluaran Tahun 2022
(Aplikasi https://prisma-pelaporan.bpk.go.id)

REALISASI KELUARAN PERIODE 12 / 2022
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Update Data

KODE RKA/KL	DIPA/PROGRAM/KEGIATAN/KELUARAN/SUBKELUARAN/KOMPONEN	REALISASI KELUARAN						Narasi
		TARGET SETAHUN	REALISASI S.D. BULAN LALU	TARGET BULAN INI	REALISASI BULAN INI	REALISASI S.D. BULAN INI	SISA S.D. BULAN INI	
CI	PROGRAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA							
1043	PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DAN PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA							
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	20	20	0	0	20	0	
001	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	20	20	0	0	20	0	Update Narasi
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	0	1	1	1	0	
994	Layanan Perkantoran	1	0	1	1	1	0	Update Narasi
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	23	23	0	0	23	0	
951	Layanan Sarana Internal	23	23	0	0	23	0	Update Narasi
FAF	Pemeriksaan Keuangan Negara	319	255	62	64	319	0	
051	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan	158	158	0	0	158	0	Update Narasi
059	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	1	1	0	0	1	0	Update Narasi
083	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	1	0	0	1	1	0	Update Narasi
091	Sumbangan IHPS Perwakilan	2	2	0	0	2	0	Update Narasi
099	Laporan Profil Entitas Perwakilan	15	0	15	15	15	0	Update Narasi
116	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada BPK Perwakilan	30	15	15	15	30	0	Update Narasi
124	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah pada BPK Perwakilan	30	15	15	15	30	0	Update Narasi
174	Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	12	11	1	1	12	0	Update Narasi
175	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	20	19	1	1	20	0	Update Narasi
U27	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	20	15	4	5	20	0	Update Narasi
U75	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	30	19	11	11	30	0	Update Narasi

NOTA DINAS
Nomor 221 /ND/XIX.PNK/9/2022

Kepada Yth.	:	Inspektur Utama
Dari	:	Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Lampiran	:	Dua berkas
Perihal	:	Kelengkapan data dan informasi kegiatan inovasi
Tempat, Tanggal	:	Pontianak, 8 September 2022

Dalam rangka penilaian mandiri pembangunan zona integritas menuju WBK tahun 2022, bersama ini kami sampaikan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data pendukung dan informasi terkait kegiatan-kegiatan inovasi yang dilakukan sebagaimana dalam lampiran nota dinas ini.

Terkait kegiatan inovasi, berikut kegiatan yang telah dilaksanakan dan terus disempurnakan sampai dengan saat ini.

1. Klinik pengadaan, sejak September 2021
2. Point-K, Portal Internal Terpadu – Keuangan, sejak Maret 2022
3. Histoper, Histori Pemeriksaan, Juni 2022 s.d. sekarang
4. Monistik_LHKPN, Monitoring Statistik LHKPN, sejak Maret 2022
5. BPK Kalbar Tanggap, sejak Juni 2021
6. Ruang Pojok SIPTL, sejak Januari 2019

Atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Wahyu Priyono
NIP 197006011991031002

Tembusan:
Inspektur PI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
KEBENARAN DATA PENDUKUNG

Yth. Tim Penilai Zona Integritas BPK
di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Priyono

Jabatan : Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat

Alamat : Jalan Ahmad Yani, Pontianak

Sehubungan dengan pembangunan, dan pengusulan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2022, dengan ini menyatakan bahwa data pendukung yang kami sampaikan. yaitu:

1. Syarat satuan kerja telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya:
2. Data dukung pengungkit telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
3. Data dukung tentang hasil telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan bahwa data yang kami sampaikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia ditinjau kembali terkait pengusulan satuan kerja/unit kerja kami dalam pembangunan zona integritas.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pontianak, Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan

Kepala Perwakilan

BPK Provinsi Kalimantan Barat

METERAI TEMPEL 10000 SEPULUH RIBU RUPIAH 5B84CAJX985163483

Wahyu Priyono

NIP. 197006011991031002

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI KEPALA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOTA DINAS
Nomor 485/ND/XI/12/2022

Kepada Yth.	:	1. Auditor Utama Keuangan Negara V 2. Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 3. Kepala Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 4. Kepala Perwakilan Provinsi Bangka Belitung 5. Kepala Perwakilan Provinsi Lampung 6. Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 7. Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat 8. Kepala Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Dari	:	Inspektur Utama
Lampiran	:	Satu berkas
Hal	:	Penyampaian Hasil Penilaian Pemberian Penghargaan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2022
Tempat, Tanggal	:	Jakarta, 21 Desember 2022

Sehubungan dengan kegiatan Penilaian Pemberian Penghargaan Pembangunan ZI Menuju WBK Tahun 2022 di BPK, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Tahap akhir penilaian telah selesai dilaksanakan melalui Rapat Pleno Tim Penilai ZI BPK pada tanggal 2 Desember 2022, pemerolehan *clearance* dari KPK terhadap satuan kerja pembangun ZI BPK tahun 2022 pada tanggal 2 Desember 2022, dan rapat koordinasi dengan Kementerian PANRB pada tanggal 9 Desember 2022.
2. Hasil penilaian Penghargaan Pembangunan ZI Menuju WBK Tahun 2022 di BPK telah ditetapkan melalui Sidang BPK pada tanggal 21 Desember 2022 dengan hasil sebagai berikut.
   a. Tujuh unit kerja/satuan kerja memenuhi persyaratan untuk **memperoleh predikat Menuju WBK** yaitu: Auditorat Utama Keuangan Negara V (AKN V), BPK Perwakilan Sumatera Selatan, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, BPK Perwakilan Provinsi Lampung, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, dan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
   b. Satu satuan kerja belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh predikat Menuju WBK yaitu: BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung.
3. Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas komitmen seluruh unit kerja/satuan kerja dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas dan mengikuti penilaian atas pembangunan Zona Integritas.
4. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Pembangunan ZI Menuju WBK Tahun 2022 sebagaimana terlampir dapat digunakan oleh seluruh unit kerja/satuan kerja untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan ZI baik dalam rangka pemerolehan predikat WBK maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun mendatang.
5. Inspektorat Utama berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi, pendampingan, dan edukasi atas kegiatan Pembangunan Zona Integritas di BPK.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Utama,

I Nyoman Wara
NIP 196707091988031004

Tembusan:
1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Anggota V
4. Anggota VI
5. Tortama KN VI
6. Sekretaris Jenderal

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

PIAGAM
PENGHARGAAN

SDM Award 2022

PENGHARGAAN INI
DIPERSEMBAHKAN KEPADA

BPK RI
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

PEMENANG III
KATEGORI PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI TERBAIK

Insani
Ikhlas | Normatif | Santun | Akuntabel | Nyaman | Inovatif

KEPALA BIRO SDM

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Gunarwanto S.E., M.M., Ak., CSFA, LCCC, CA

#TEGAS

Trust - Educate - Good Governance - Accountable - Sinergy

Jl. A. Yani, Pontianak, 78124

(0561) 585349

kalbar.bpk.go.id

@bpkri.kalbar

@bpkrikalbar